

**PEMBERDAYAAN PENANGGULANGAN BANJIR DESA KEMIRI  
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN**

**Saipullah Hasan<sup>1</sup>**  
**Avin Wimar Budyastomo<sup>2</sup>**

Hal | 86

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam<sup>1</sup>  
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam<sup>2</sup>  
Fakultas Dakwah, IAIN Salatiga  
Jalan. Lingkar Salatiga Km. 02. Pulutan. Kecamatan Sidorejo. Kota Salatiga 50716  
Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia  
[saifulhasan@iainsalatiga.ac.id](mailto:saifulhasan@iainsalatiga.ac.id)<sup>1</sup>  
[avin@iainsalatiga.ac.id](mailto:avin@iainsalatiga.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

IAIN Salatiga dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menempuh cara dengan menggulirkan program KKN untuk memberdayakan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan penanganan banjir di Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh Tim pendamping KKN IAIN Salatiga. Adapun metode pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Melalui pendekatan PAR, tim pendamping KKN melakukan proses *assesment* bencana, merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan penanganan bencana banjir. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa upaya pendampingan tim pendamping KKN dilakukan dengan advokasi, gerakan penghijauan, dan pembersihan lingkungan desa. Melalui berbagai pendampingan tersebut, terlihatlah bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam melakukan proses pencegahan dan penanganan bencana banjir.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan; Penanggulangan; Bencana Banjir

## PENDAHULUAN

Sebagaimana tercermin dalam tri dharma perguruan tinggi memiliki tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan dan saling menguatkan. Yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. ketiga pilar tersebut haruslah dilakukan secara berdampingan tanpa ada yang dihilangkan. Jika ada salah satu yang hilang dari tri dharma itu, maka penyelenggaraan proses pendidikan di perguruan tinggi tidak akan berjalan dengan baik (Ali & Hasan, 2019)

Fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini, memberikan konsekuensi terhadap realita sosial masyarakat yang semakin terjebak dalam persoalan individualisme yang secara perlahan akan melenyapkan seni dan budaya yang tidak ternilai harganya (Andika et al., 2020).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan menghasilkan suatu kebijakan baru di lapangan. Karena dengan adanya kegiatan ini, secara langsung dapat mengetahui keadaan ditempat lokasi KKN (Budyastomo & Hasan, 2021).

Selanjutnya dimulai dari kondisi ini, berbagai cara dan strategi diambil oleh perguruan tinggi untuk dapat mengoptimalkan dharma mereka. Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi adalah salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi (Noor, 2010). Hal ini sesuai amanat Undang-undang No. 12 tahun 2012. Dalam UU ini pengabdian pada masyarakat diartikan sebagai kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fenomena pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi belum menunjukkan terjalannya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antar

berbagai pihak yang berkepentingan dan aktor-aktor kunci pemberdayaan dalam memenuhi kebutuhan, tantangan, dan persoalan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Perguruan tinggi sebagai agen perubahan sudah tentu memiliki sumberdaya manusia dari berbagai disiplin ilmu yang dapat menghasilkan inovasi dalam penerapan sains dan teknologi. Kesemua itu dapat diterapkan untuk praktik pengabdian masyarakat yang membawa perubahan (Padil & Antin, 2018).

Konsep *organics intellectual* oleh Antonio Gramsci kiranya relevan dalam semangat melakukan pengabdian masyarakat. Secara sederhana *organics intellectual* dapat dipahami sebagai intelektual yang tidak hanya berkuat dengan pengembangan keimanan saja tetapi lebih dari itu memiliki kepedulian dan kesadaran melibatkan diri dalam kegiatan perbaikan kondisi manusia (Salahuddin et al., 2015).

Dalam melakukan pengabdian masyarakat, IAIN Salatiga menempuh jalan dengan menggulirkan program KKN yang dilaksanakan satu tahun sekali. Program KKN yang dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, kehadiran program KKN akan terasa lebih kontekstual yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat saat ini untuk membawa perubahan yang lebih baik. Tim pendamping KKN IAIN Salatiga dalam memberikan pelayanan dan pendampingan masyarakat memilih lokasi di Desa Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Lokasi ini dipilih karena masyarakat membutuhkan upaya pendampingan dalam menghadapi permasalahan bencana banjir. Bencana ini telah berdampak pada menuruannya kualitas hidup masyarakat sehingga

menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan penanganannya.

Kehadiran bencana sudah tentu tidak dikehendaki oleh masyarakat karena berpotensi merugikan kehidupan mereka. Masyarakat Desa kemiri pada dasarnya telah mengetahui bahwa wilayah hunian mereka berada pada kondisi tidak aman atau bahaya khususnya pada saat musim hujan tiba. Namun pemahaman masyarakat itu belum diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mengurangi dan mengatasi bahaya longsor. Dalam kondisi demikian, masyarakat membutuhkan sebuah upaya penyadaran dan pendampingan untuk melakukan tindakan bersama dalam pengurangan risiko bencana banjirdemi keberlanjutan kehidupan mereka.

Sebenarnya banyak kemungkinan untuk kembali menggiatkan program KKN dengan melibatkan partisipasi Perguruan Tinggi melalui dosen dan mahasiswanya dalam program Penanggulangan Bencana. Dengan adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari penekanan terhadap aspek tanggap darurat kepada penekanan secara holistik manajemen resiko bencana, maka peluang keterlibatan Perguruan Tinggi sangat besar pada berbagai tahapan manajemen penanggulangan bencana, baik melalui kegiatan Penelitian maupun melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (Ningsih & Windarto, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan bencana banjir oleh tim pendamping KKN. Adapun metode penelitian menggunakan *Participatory Action Research* (PAR).

PAR adalah penelitian yang melibatkan partisipasi aktif stakeholder yang relevan dalam melakukan tindakan berdasarkan pengalaman mereka sebagai persoalan untuk melakukan perubahan. Penerapan KKN dengan penelitian aksi partisipatif dalam penanganan bencana di

Indonesia masih jarang dilakukan. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka penanganan problem banjir dan kebutuhan penanganan bencana di masa depan untuk melindungi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Sebagai bagian dari kaum akademisi tentu memiliki kewajiban dan berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan mengembangkan keterampilan bagi masyarakat (Mubarat & Ilhaq, 2019).

## PEMBAHASAN

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) sebagai metode pelaksanaan kegiatan KKN. Melalui pendekatan PAR, peneliti memfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam penelitian dan melakukan tindakan penanganan bencana banjir. Lokasi penelitian di Desa Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan pertimbangan bahwa didaerah tersebut merupakan desa yang sering dilanda bencana khususnya banjir. PAR berusaha untuk melibatkan subjek penelitian dalam memecahkan masalah yang mereka identifikasi mempengaruhi komunitas mereka. Salah satu masalah tersebut adalah menangani bencana (Kelman et al., 2011).

Alasan memilih PAR sebagai metode penelitian karena metode ini tidak hanya menguntungkan peneliti saja tetapi juga memberikan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. PAR dianggap lebih manusiawi, karena mereka dihargai harkat dan martabatnya. Masyarakat diposisikan sebagai subyek aktif penelitian dan dalam merumuskan kebutuhan program untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam PAR ukuran utama keberhasilan jika masyarakat yang terlibat

merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat program (Ansori et al., 2021).

Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan validitas data dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

### **Langkah-langkah PAR dalam Pemberdayaan**

Langkah-langkah *Participatory Action Research* (PAR) adalah sebagai berikut: pertama, Pemetaan Awal (*Preliminary mapping*) (Afandi, 2017). Pemetaan awal yang dilakukan tim pendamping KKN adalah menentukan lokasi penelitian di Desa Kemiri. Dalam menentukan lokasi, LPPM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan lokasi sendiri. Kehadiran peneliti di tengah masyarakat disambut baik oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Penerimaan dan sambutan yang hangat dari masyarakat ini memudahkan peneliti untuk diterima dan menjadi bagian dari anggota masyarakat Desa Kemiri.

Tim pendamping KKN juga menemui beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk meminta izin dan masukan agar penelitian dan pemberdayaan masyarakat nantinya dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat untuk perubahan sosial yang lebih baik di masyarakat. Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan dipandang sebagai *key people* (kunci masyarakat) yang akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan agenda penelitian dan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kedua, Membangun Hubungan Kemanusiaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan inkulturasi dalam rangka membangun kepercayaan (*trust building*) dengan masyarakat. Langkah yang ditempuh adalah berbaur dengan masyarakat, silaturahmi kepada tokoh

agama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Berbagai masukan diberikan kepada tim pendamping KKN untuk senantiasa menerapkan etika dan menyesuaikan budaya masyarakat setempat.

Tim pendamping KKN juga melibatkan diri dalam mengikuti kegiatan sehari-hari di masyarakat. Misalnya terlibat dalam aktivitas pekerjaan warga, jamaah shalat, pertemuan rutin bank sampah dan kerja bakti. Cara-cara yang demikian ini dirasa efektif untuk menjalin pendekatan dan mencari tahu permasalahan dan kebutuhan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, penentuan agenda riset untuk perubahan sosial. Menentukan agenda riset dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk bisa memahami kondisi sosial, ekonomi dan budaya dan problematika yang dihadapi. Dari riset partisipatif ini nantinya akan menjadi langkah awal dalam merumuskan tindakan dan program untuk dalam mencapai tujuan perubahan.

Keempat, Pemetaan partisipatif. Riset pemetaan dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan perencanaan program pemberdayaan agar sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Hasil pemetaan memperlihatkan bahwa Desa Kemiri memiliki beragam potensi seperti pertanian, peternakan, UMKM dan lainnya, tetapi disisi lain juga merupakan kawasan rawan bencana. Dalam kegiatan pemetaan ini, peneliti bersama warga secara bersama melakukan identifikasi permasalahan, kebutuhan dan sumber daya untuk mencari tahu peluang pemecahan masalah dan pengembangan potensi yang dimiliki.

Kelima, Merumuskan Masalah Kemanusiaan. Kegiatan riset yang dilakukan bersama masyarakat menyajikan temuan masalah diantaranya Desa Kemiri merupakan wilayah rawan terjadi banjir.

Setiap tahun desa ini mengalami banjir yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Secara letak wilayah desa ini masuk dalam kawasan daerah aliran sungai tumpang sebagai penyebab utama dalam terjadinya banjir.

Keenam, Menyusun Strategi Gerakan. Penyusunan strategi gerakan dilakukan melibatkan partisipasi stakeholder terkait. Peneliti melakukan pendekatan kepada pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, mahasiswa dan tim pendamping KKN IAIN Salatiga. Upaya-upaya pemberdayaan yang akan dilakukan, tidaklah mungkin dilakukan oleh peneliti sendiri melainkan berbagai elemen yang berkepentingan untuk mensejahterakan masyarakat. Masing-masing stakeholder akan memberikan kontribusi dan perannya dalam usaha mensukseskan program pemberdayaan masyarakat.

Ketujuh, Pengorganisir sumber daya manusia. Sumber daya manusia dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam mengatasi banjir. Selain itu, tim pendamping juga mengorganisir sumber daya manusia dari Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH) dan pemerintah desa untuk membantu dalam upaya membangun upaya mitigasi dan penanggulangan banjir.

Kedelapan, melakukan Aksi perubahan. Hal ini dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil peran dan berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat. Aksi perubahan yang dilakukan adalah (1) memberikan advokasi kepada pemerintah desa (2) melakukan pembersihan selokan secara rutin (3) melakukan reboisasi dengan tanam 1000 bibit.

## **Desa Kemiri Sebagai Wilayah Rentan Bencana**

Pemerintah Desa Kemiri mengusung visi “Membangun masyarakat Desa Kemiri yang sejahtera”. Komitmen pelayanan terdiri atas: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan. (2) Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan, (3) Meningkatkan kerukunan umat beragama. (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur. (5) Mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM). (6) Menggali dan meningkatkan potensi kearifan lokal.

Desa Kemiri merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Desa Kemiri apabila ditinjau secara orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan berada pada 26 km dari Ibu Kota Provinsi yaitu Kota Semarang, 32 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan dan 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan. Adapun batas-batas wilayahnya meliputi sebelah timur berbatasan dengan Desa Mlilir, sebelah selatan dengan Sungai Tumpang, sebelah barat dengan Desa Pilangwetan Kabupaten Demak, dan sebelah utara dengan Desa Tinanding Kecamatan Godong.

Adapun penentuan suatu kawasan sebagai desa rentan bencana pada umumnya didasarkan pada pertimbangan wilayah yang mendapatkan dampak langsung dari bencana. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menetapkan daerah atau masyarakat yang berada pada posisi rentan bencana. Pertama, wilayah yang secara geografis berdekatan rawan bencana sehingga memiliki risiko tinggi akan terkena dampak bencana. Kedua, terjadinya bencana di luar kemampuan masyarakat karena kemunculannya secara tiba-tiba sehingga sulit dilakukan langkah-langkah pencegahan dan persiapan sebelum bencana. Ketiga, wilayah yang memiliki risiko tinggi tetapi memungkinkan untuk melakukan upaya pencegahan,

mengurangi dan mengatasi dari dampak yang ditimbulkannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Desa kemiri termasuk pada kategori pertama dan ketiga. Wilayah desa ini sering mengalami bencana khususnya banjir dan tidak jarang dampak yang ditimbulkan merugikan kehidupan masyarakat setempat. Pertimbangan itulah yang menjadi alasan Desa kemiri ditetapkan sebagai wilayah rentan bencana. Dengan demikian, Desa kemiri secara geografis memiliki risiko tinggi terhadap dampak bencana banjir, tetapi dari sisi kemunculan dapat diprediksi dan dampak yang ditimbulkannya memungkinkan untuk dicegah, dikurangi dan diatasi.

Desa kemiri telah ditetapkan menjadi zona siaga 1, 2 dan 3 yang tersebar di beberapa wilayah pada lingkup dusun dan RT. Di desa ini telah memiliki titik evakuasi yang berguna sebagai petunjuk jalur evakuasi dalam melakukan penyelamatan masyarakat dari bahaya bencana pada saat masa tanggap darurat sebagaimana dapat dilihat pada peta pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Peta Tanggap Bencana Desa Kemiri

Dari penjelasan peta tersebut tampak bahwa ada pembagian zona siaga 1 yang diberikan warga merah, zona siaga 2 dengan warga kuning pekat dan zona siaga 3 dengan warna kuning terang. Pembagian zona ini penting bagi masyarakat agar memahami kondisi kerentanan wilayahnya

untuk dilakukan upaya penanganan bencana. Peta tanggap bencana ini menjadi referensi utama bagi pemerintah desa dalam upaya melakukan upaya tanggap darurat dan pencegahan bencana banjir.

### **Analisis Bencana Banjir Desa Kemiri**

Hal | 91

Banjir merupakan luapan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai (Awalia et al., 2015). Jika diamati, terjadinya bencana banjir di Desa kemiri terjadi karena adanya pertemuan antara bahaya dan kerentanan, kurangnya kesiapan/kemampuan masyarakat serta terdapat pemicunya. Kesemua itu terjadi setelah melalui serangkaian proses dan melewati beberapa kriteria.

Pertama, adanya unsur bahaya (banjir). Kedua, adanya kerentanan (masyarakat tinggal di wilayah rentan terjadi banjir yaitu di kawasan sungai). Jika masyarakat tinggal disekitar wilayah sungai maka masyarakat tersebut rentan terhadap bencana banjir.

Pada 10 tahun terakhir, banjir paling parah terjadi pada tahun 2016 yaitu tanggal 10 Oktober 2016. Banjir pada waktu itu membuat tanggul sungai Tuntang jebol. Ada tiga titik tanggul sungai Tuntang di Kecamatan Gubug jebol. Akibatnya empat desa di Kecamatan Gubug terendam banjir.

Banjir yang terjadi tidak sampai membawa korban jiwa tetapi berdampak pada kerugian harta benda masyarakat. Ada sekitar 400 rumah warga Desa Kemiri yang terendam banjir dan 3 rumah warga hanyut terbawa aliran air. Selain itu, banjir juga berakibat pada rusaknya lahan

sawah warga yang terendam dengan ketinggian air kurang lebih 50 *centimeter*. Aktivitas masyarakat menjadi lumpuh. Kegiatan pendidikan sekolah dan pelayanan di kantor balai desa dihentikan.

Kehadiran bencana banjir di Desa kemiri merupakan konsekuensi logis dari aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pada pengertian ini memahami sumber penyebab terjadinya bencana banjir di Desa kemiri tidak cukup dilihat dari faktor alam, tetapi lebih jauh lagi faktor aktivitas manusia juga ikut berperan dalam meningkatkan risiko dan bahaya longsor. Beberapa aktivitas masyarakat yang berhasil diidentifikasi yaitu pembangunan pemukiman di kawasan persawahan, penebangan pohon, membuang sampah sembarangan dan aktivitas masyarakat lainnya. Berbagai kegiatan masyarakat tersebut sudah tentu turut berperan besar dalam meningkatkan kerentanan bencana banjir. Oleh karenanya, program pendidikan penting dilakukan untuk membangun kesadaran tentang bahaya banjir dan upaya pemecahannya.

Akibat dari tindakan dan perlakuan dari manusia terhadap alam dan lingkungan terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang tidak bijaksana dapat saja menyebabkannya terjadinya gangguan pada siklus air (Hanny et al., 2019). Sehingga penting kiranya pembangunan memperhatikan daerah aliran sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai adalah wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Perubahan fisik yang terjadi di DAS akan berpengaruh

langsung terhadap kemampuan retensi DAS terhadap banjir (Sudamara et al., 2012).

Penyebab lain banjir adalah adanya pendangkalan sungai, terjadi karena penggundulan hutan dan pertanian intensif penyebab erosi. Tanah yang tererosi masuk ke sungai, apabila tingkat penggundulan dan penggunaan pertanian intensif makin tinggi, tanah akan masuk ke sungai. Sebagai dampaknya, tanah akan mengendap di sungai sehingga terjadilah pendangkalan dasar sungai, jika air bertambah sungai akan meluap dan terjadilah banjir (Murdiyanto & Gutomo, 2015).

Untuk mencegah dan menanggulangi banjir pemerintah desa telah melakukan beberapa tindakan. Pertama menggulirkan program sanitasi di beberapa titik yang tersebar di wilayah RT. Kedua, membuat lubang biopori untuk menyerap air sehingga diharapkan mampu mengurangi debit air dengan lebih cepat. Ketiga, membangun saluran air untuk memperlancar aliran air menuju sungai. Berbagai cara yang ditempuh pemerintah desa tidak efektif karena banjir yang terjadi di desa kemiri disebabkan mendapatkan kiriman air dari sungai tumpang.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatasi dan mencegah banjir belum mampu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Peningkatan kemampuan masyarakat perlu kiranya mengadakan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjalin

dengan kemitraan dengan stakeholder terkait. Adanya kerja sama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti gerakan penghijauan dan menjaga lingkungan untuk melakukan upaya mitigasi sebagai bentuk ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

### **Pemberdayaan Penanggulangan Banjir**

Untuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi, maka perlu adanya upaya mitigasi bencana banjir sehingga dampak negatif berupa kerugian dapat dikurangi. Mitigasi bencana dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, diartikan sebagai “Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana” (Mardikaningsih et al., 2017). Adapun manajemen pengurangan risiko bencana dimulai ketika belum terjadi bencana sampai saat menjelang terjadinya bencana sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisasi sedini mungkin (Sudamara et al., 2012).

Kegiatan penanganan bencana dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama, sebelum terjadi bencana diperlukan penanganan tentang kewaspadaan dan sistem peringatan dini. Kedua, pada saat kejadian bencana, penanganan berupa penanggulangan segera atau tanggap darurat, dan pasca bencana penanganan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga, kelompok kegiatan itu memiliki peran penting masing-masing dalam menekan jumlah

kerugian dan korban sebagai dampak bencana (Susanto, 2010).

Pemberdayaan dalam konteks bencana adalah melakukan tindakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana. masyarakat adalah pelaku terbaik dalam mengatasi masalah bencana karena mereka telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan hidup berdampingan dengan bencana.

Penanganan bencana yang dilakukan pengorganisir bukanlah suatu pekerjaan kegiatan amal semata, melainkan kegiatan yang terorganisir dan sistematis sehingga membutuhkan suatu metode partisipatif untuk mencegah, mengurangi dan mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan bencana. Pemberdayaan bukanlah sekadar bagi-bagi uang, makanan, obat-obatan dan bantuan sosial lainnya, melainkan kegiatan yang terencana untuk menanggulangi bencana mulai tahap pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah membuat masyarakat berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Hilman, 2018). Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupannya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya lokal sebaik mungkin (Nurjanah et al., 2016). Kemampuan kemandirian dilakukan dengan segala kemampuan dan potensi yang ada dalam diri dan

lingkungannya, atau dengan kata lain pemberdayaan menggunakan prinsip *to help people to help them selves* (Saraswati, 2017).

### **Advokasi Pemerintah Desa**

Permasalahan banjir di Desa Kemiri lebih difokuskan pada upaya pembangunan fisik untuk mencegah dan mengatasinya. Pembangunan dari sisi manusia untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana belum menjadi perhatian utama. Permasalahan bencana banjir belum menjadi isu seksi yang dilirik oleh pemerintah desa sebagai investasi sosial dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan desa.

Untuk mengubah pandangan pemerintah desa dan orientasi kebijakannya, tim pendamping KKN telah melakukan strategi advokasi. Tim secara intensif menjalin komunikasi dengan para pemerintah desa dan masyarakat setempat. Komunikasi ini dilakukan untuk membangun kerja sama bahwa isu penanganan bencana perlu mendapatkan prioritas dalam perumusan kebijakan desa.

Alhasil, pemerintah desa dan masyarakat lebih responsif terhadap isu bencana. Respon positif pemerintah desa terlihat dari dukungan mereka untuk memberikan dukungan untuk menggulirkan program penghijauan dan pembersihan lingkungan. Mereka secara bersama berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir demi keberlanjutan kehidupan di masa depan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana termasuk dalam hal rekonstruksi dan

rehabilitasi dari pasca bencana. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana (Suryadi, 2020).

Pemerintah hadir karena adanya komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat (Awalia et al., 2015).

### **Kerja Bakti Bersih Lingkungan**

Kegiatan kerja bakti berangkat dari perhatian masyarakat terhadap kondisi lingkungannya yang kotor. Hal ini terlihat pada tumpukan sampah yang ada di selokan saluran air menuju sungai. Warga khawatir jika tidak dilakukan pembersihan sampah maka akan menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Adanya permasalahan ini direspon oleh ketua RT setempat dengan mengajak mahasiswa KKN dan warnya untuk bersama bergotong-royong melakukan kerja bakti. Hal ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungannya.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menggerakkan warga dengan membersihkan lingkungan dengan cara gotong royong bersih desa seperti membersihkan

selokan dan saluran air atau gorong-gorong yang tersumbat oleh sampah sehingga jika musim hujan tiba bisa terhindar dari terjadinya banjir (Imamsari et al., 2017). Kegiatan Bersih Selokan di Musim Penghujan dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Kegiatan Bersih Selokan di Musim Penghujan

Kesadaran budaya peduli lingkungan di kalangan masyarakat yang harus ditumbuhkan dengan beberapa cara seperti sosialisasi mengenai kebersihan selokan dan kebiasaan memilah sampah yang ada di sekitaran lingkungannya (Awalia et al., 2015).

Pendidikan dan sosialisasi tentang kebersihan selokan ini dapat kita lakukan dikalangan mahasiswa, warga dan masyarakat pendatang agar berdampak positif, yang diantaranya memiliki manfaat besar bagi lingkungan masyarakat (Afianto et al., 2017).

Kerja bakti yang pertama, dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2021 di RW 1, dimana RW tersebut merupakan daerah posko KKN. Tim pendamping melakukan koordinasi Ketua RW 1 guna pelaksanaan kegiatan ini. Kerja bakti dilaksanakan di depan rumah masing-masing dengan membersihkan sampah di selokan untuk pencegahan banjir.

Kegiatan dilakukan di depan rumah masing-masing dikarenakan situasi Pandemi Covid-19 yang tidak memperbolehkan adanya kerumunan. Kegiatan ini juga dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan setelah kegiatan juga diwajibkan untuk mencuci tangan supaya terhindar dari bakteri dan juga kuman yang menempel di tangan.

Kerja bakti yang kedua, yaitu membersihkan mushola di depan Posko KKN, yang diadakan pada tanggal 21 Januari 2021. Tim pendamping KKN dan warga setempat membersihkan seluruh lingkungan mushola untuk kenyamanan beribadah warga sekitar mushola. Kerja bakti yang ketiga, di wilayah RW 4 pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, tim pendamping bersama warga dari kalangan laki-laki membantu kerja bakti untuk Masjid Su'ada yang akan dibongkar.

Masjid tersebut berencana untuk ditinggikan, agar tidak terendam air ketika ada banjir. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga RW 4 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan pembagian tugas masing-masing. Laki-laki berpartisipasi untuk langsung mengerjakan kerja bakti pembangunan masjid sedangkan perempuan memberikan layanan kebutuhan konsumsi. Kegiatan gotong royong dalam rangka peninggian masjid dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Kegiatan Gotong Royong Dalam Rangka Peninggian Masjid

Lalu kerja bakti yang terakhir yaitu di wilayah Balai Desa Kemiri, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021. Kami membersihkan area Balai Desa, memotong rumput dan membersihkan sampah.

Hal ini penting dilakukan mengingat lingkungan balai desa adalah pusat pemerintahan desa kemiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya lingkungan yang bersih diharapkan mampu memberikan kesan positif dan contoh bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat (Mardikaningsih et al., 2017).

### **Gerakan Penghijauan**

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan tim pendamping KKN bersama warga adalah mengadakan gerakan penghijauan melalui penanaman 1000 bibit pohon. Adanya gerakan penghijauan ini karena adanya keinginan bersama untuk menciptakan lingkungan hijau dan sebagai langkah pencegahan banjir. Kegiatan penanaman bibit pohon ini diharapkan ke depannya mampu meningkatkan daya serap dan simpan air sehingga dapat mencegah dan mengurangi debit air di saat musim penghujan.

Kegiatan penghijauan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat dilakukan diharapkan (1) dapat

menanggulangi menurunnya kualitas lingkungan (2) dapat meningkatkan daya serap air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut. Menumbukan kesadaran kepada masyarakat khususnya masyarakat mengenai pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan (Kartika et al., 2021).

Penanaman 1000 Bibit Pohon ini bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH) yang berlokasi di Ungaran Timur. Adanya kerja sama ini dimulai ketika mahasiswa melakukan komunikasi dengan Bapak Purnomo yang merupakan salah satu pegawai di Dinas Perhutani Provinsi Jawa Tengah.

Tim pendamping KKN menjelaskan tujuannya untuk meminta dukungan dalam penyediaan bibit dalam menyelenggarakan gerakan penghijauan di desa kemiri. Bapak purnomo memberikan respon positif dan menyampaikan siap membantu mensukseskan program KKN tersebut. Setelah itu, tim pendamping mengajukan proposal 1000 bibit pohon kepada BSPTH.

Pada tanggal 15 Februari 2021 kegiatan penanaman 1000 bibit dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Adapun bibit pohon tersebut adalah kategori bibit produktif yang akan menghasilkan buah yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau dijual untuk menambah penghasilan warga. Jenis bibit pohon terdiri dari jambu biji, pohon kesambi, pohon sirsak, dan tabebuya.

Dengan diadakannya program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat yang akan membawa dampak positif dan menguntungkan bagi tumbuh kembangnya perekonomian Desa Kemiri.

Hal ini dikarenakan dengan adanya budidaya kebun buah-buahan warga Desa Kemiri akan lebih produktif dalam mengelola tanaman buah-buahan yang

nantinya akan ditanam di pekarangan dan lahan kosong sebagai desa penghasil buah. Tim pendamping KKN melakukan distribusi Bibit Pohon dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Tim Pendamping KKN Melakukan Distribusi Bibit Pohon

Pada saat distribusi bibit, warga Desa Kemiri memiliki antusias sangat tinggi, dibuktikan dengan hadirnya beberapa delegasi warga Desa Kemiri yang ditunjuk oleh RW yang bersangkutan untuk pengambilan bibit pohon di Balai Desa. Para warga membawa kendaraan pengangkut bibit untuk memindahkan bibit pohon dengan perkiraan 250 bibit per RW.

Bibit yang telah diberikan di masing-masing RW selanjutnya ditanam di lahan pekarangan kosong yang telah ditunjuk oleh ketua RW terkait. Kegiatan tanam di lahan kosong ini diikuti oleh kepala desa sebagai bentuk partisipasinya untuk mensukseskan program gerakan penghijauan. Kegiatan ini memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Pemanfaatan lahan

## KEPUSTAKAAN

Afandi, A. (2017). *Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif*.

Afianto, M. T., Pradana, T. M. W., Prayogo, B. E., Lestari, L. I., & Huda, K. (2017). PROGRAM PILOT PROJECT TATA KELOLA SELOKAN AREA URBAN KOS BERSAMA MASYARAKAT SEKARAN. *Jurnal Abdimas*, 21(1), 55–

pekarangan dengan budidaya tanaman produktif. (2) Pemanfaatan lahan penghijauan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi menjaga lingkungan sekitar.

## SIMPULAN

Hasil penelitian dan pendampingan mahasiswa KKN ini menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh Tim pendamping KKN IAIN Salatiga dengan menggunakan metode PAR memperlihatkan adanya bukti keberhasilan dan manfaat kepada masyarakat.

Hal ini tampak dengan adanya hubungan kepercayaan dan kerja sama dengan pemerintah terkait dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan membentuk gerakan penghijauan dan pembersihan lingkungan. Melalui pendampingan Tim pendamping KKN, terlihatlah bagaimana masyarakat setempat lebih respon terhadap ide-ide program penanggulangan bencana demi menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa depan.

64.

Ali, M., & Hasan, S. (2019). Da'wah bi al-Hal in Empowering Campus-Assisted Community through Waste Bank Management. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 13(2), 201–219.  
<https://doi.org/10.15575/idajhs.v13i2.6441>

Andika, B., Andiko, B., & Sari, D. P. (2020). Metode Pelatihan Bernyanyi Dan Bercerita Pada Guru-Guru Tk/Paud

- Seaceh Besar Dalam Mendidik Kreativitas Seni Pada Anak Kab. Aceh Besar. *Batoboh*, 5(2), 100–112. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Batoboh/article/view/1303/595>
- Ansori, M., Afandi, A., Fitriyah, R. D., Safriyani, R., & Farisi, H. (2021). *Pendekatan-Pendekatan Dalam University – Community Engagement* (W. B. Siregar, Fitriah, A. Samsuri, & L. Huriyah (eds.); 1st ed.). UIN SUNAN AMPEL PRESS.
- Awalia, V. R., Mappamiring, & Aksa, A. N. (2015). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 202–213. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.124>
- Budyastomo, A. W., & Hasan, S. (2021). Peran Pengabdian Masyarakat Melalui Penguatan Keluarga, Kelembagaan Sosial Dan Desa Di Masa Pandemi Covid-19 . *Batoboh*, 6(1), 19–32. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Batoboh/article/view/1584/649>
- Hanny, P., Franklin, P. J. ., & Lakat, R. M. . (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapan Siaga Mengantisipasi Ancaman Bencana Alam Di Desa Kali Dan Kali Selatan Minahasa. *Media Matrasain*, 16(1), 25–39.
- Hilman, Y. A. (2018). Disaster Management Concept of Muhammadiyah Disaster Management Centre in Ponorogo, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 65–81. <https://doi.org/10.26618/ojip.v8i1.807>
- Imamsari, F. S., Triastuti, R., & Wijianto. (2017). Partisipasi Masyarakat Pada Penanggulangan Banjir Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Educitizen*, 2(1), 241485.
- Kartika, S. A., Dani, M., Suherman, A., Toriq, F., & Pranata, P. (2021). Pemberdayaan Warga Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan, dalam Pengelolaan Lingkungan dan Minyak Jelantah. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 466–473. [https://doi.org/awareness,environmental management, cleanliness, used cookingoil](https://doi.org/awareness,environmental%20management,cleanness,used%20cookingoil)
- Kelman, I., Lewis, J., Gaillard, J. C., & Mercer, J. (2011). Participatory action research for dealing with disasters on islands. *Island Studies Journal*, 6(1), 59–86.
- Mardikaningsih, S. M., Muryani, C., & Nugraha, S. (2017). Studi Kerentanan dan Arah Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016. *Jurnal Geo Eco*, 3(2), 157–163.
- Mubarat, H., & Ilhaq, M. (2019). Training Of Straw Eksploration To Art Statue In Martapura Ogan Komering Ulu Timur, South Sumatra. *Batoboh*, 4(1), 44–57. <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/Batoboh/article/view/701/429>
- Murdiyanto, & Gutomo, T. (2015). Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan. *Jurnal PKS*, 14(4), 437–452.
- Ningsih, S. R., & Windarto, A. P. (2018). Penerapan Metode Promethee II pada Dosen Penerima Hibah P2M Internal. *InfoTekJar (Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan)*, 3(1), 20–25. <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v3i1.641>
- Noor, I. H. (2010). Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 285. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i3.462>
- Nurjanah, A., Karsidi, R., Muktiyo, W., & Habsari, S. K. (2016). Building and Empowering Community Through CSR Program In Indonesia: A Case

- Study of Waste Problem. *International Journal of Ecology & Development*<sup>TM</sup>, 31(4), 57–67.
- Padil, & Antin, T. (2018). Paradigma Baru Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jpm.v1i2.420>
- Salahuddin, N., Safriani, A., Ansori, M., Purwanti, E., Hanafi, M., Naili, N., Zubaidi, A. N., Safriyani, R., Umam, M. H., Ilaihi, W., Taufiq, A., & Swasono, E. P. (2015). *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya Asset Based Community-driven Development (ABCD)* (Sulanam & N. Salahuddin (eds.)). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Saraswati, G. (2017). Community Empowerment Through Creative Entrepreneurship Based on Local Wisdom. *JESA-Jurnal Edukasi Sebelas April*, 1(2).
- Sudamara, Y., Sompie, B. F., & Mandagi, R. J. M. (2012). Di Kota Manado Dengan Metode Ahp ( Analytical Hierarchy Process ). *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING*, 2(4), 232–236.
- Suryadi, N. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2020(2), 425–436.
- Susanto, E. (2010). Masyarakat Daerah Aliran Sungai Code Dalam Menanggulangi Dampak Bencana Banjir. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1).